



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PELIMPAHAN
KEWENANGAN PEMUNGUTAN BPHTB
(STUDI KASUS PERBANDINGAN KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH)**

SKRIPSI



**RIZA FEBRI
07153017**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS EKONOMI**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi, Pembimbing Skripsi dan Tim Dosen Penelaah skripsi menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : Riza Febri
Nomor Buku Pokok : 07 153 017
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **Kesiapan Pemerintah Daerah Atas Pelimpahan Kewenangan Pemungutan BPHTB (Studi Kasus Perbandingan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)**

Telah diseminarkan tanggal 3 Mei 2011 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Juni 2011

Pembimbing

Drs. Suhandi, M.Si. Ak.
NIP. 19691220.199512.1001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 19541009.198012.1001

Dr. H. Yuskar, SE. MA. Ak
NIP. 19600911.198603.1001

ABSTRAK

**RIZA FEBRI, 07153017 : KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMUNGUTAN BPHTB (STUDI KASUS
PERBANDINGAN KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH)**

Skripsi ini membahas hal-hal yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh terkait dengan kesiapan pemerintah daerah atas pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, per 2011 pajak BPHTB akan sepenuhnya ditangani pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan pemerintah daerah atas pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB dalam upaya memperbaiki struktur penerimaan dan peningkatan pendapatan daerah. Tujuan penulisan ini adalah menjelaskan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta kuisioner untuk mengetahui tingkat pemahaman aparat pemda. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai sudah siap dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB jika ditinjau dari peraturan kepala daerah, administrasi pemungutan dan pendanaannya. Walaupun peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum rampung, namun pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki peraturan kepala daerah tentang pemungutan pajak BPHTB. Untuk Kota Payakumbuh, jika ditinjau dari peraturan daerah saat ini Kota Payakumbuh masih belum siap dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB karena peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak BPHTB masih belum selesai disahkan. Masalah utama yang dihadapi masing-masing pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan tenaga profesional di bidang pertanahan. Kesiapan SDM ini membutuhkan investasi biaya dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar pengelolaannya tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Kesiapan Pemerintah Daerah, Sistem Perpajakan Daerah, dan BPHTB*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, serta salawat beriring salam penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan kita Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BPHTB (STUDI KASUS PERBANDINGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH)”**, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak yang telah ikut serta memberikan bimbingan dan dukungan baik materi maupun moril, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Drs. Suhandi, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak pengarahan, nasehat, bimbingan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Bapak Tim Penguji, yaitu: Bapak Dr. Suhairi, SE, M.Si., Ak dan Bapak Drs. Riwayadi, MBA, Ak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Da Ari, Mama Loli dan Ni Epa yang telah memberikan kemudahan serta pengetahuan kepada penulis.

6. Bapak dan Ibu Staff DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPPKAD Kota Payakumbuh yakni Buk Iya, Bapak Masmed, Buk Meta dan Buk Dewi yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
7. Orang tua tercinta, Kakak dan Adik serta ponak_n ku simungil 'Azka' dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih ku Tak Hingga untuk yang "Terkasih dan Tersayang", Zulhadi Awalibi Masril. Lugh U..
9. Konco2 ku yang selalu menemani ku selama 4 tahun, RenGga, MarTa, Yola. Walau terlihat tak peduli, tapi hati ini dekat dengan kalian...
10. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Selfi, Si'bos, kak Dila, Ridzka, dan teman-teman yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bimbingan, petunjuk-petunjuk dan bantuan moril yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan diberi pahala oleh Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam usaha peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan Jurusan Akuntansi pada khususnya.

Padang, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Batasan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan	8
 BAB II TINJAUAN LITERATUR	
2.1 Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pelimpahan Kewenangan Pemungutan BPHTB.....	10
2.1.1 Pengertian Kesiapan	10
2.1.2 Beberapa Aspek Kesiapan Pemerintah Daerah.....	11
2.1.2.1 Tingkat Pemahaman Aparatur Pajak Terhadap Undang-Undang Pajak Daerah.....	11
2.1.2.2 Kesiapan Operasional.....	11
2.1.2.3 Kesiapan Teknis	12
2.1.2.4 Kesiapan Jadwal dan Dana.....	14
2.2 Pajak Daerah	14
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah	14

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah	16
2.2.3 Kriteria Perpajakan Daerah	18
2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	21
2.3 Sistem Perpajakan Daerah.....	22
2.3.1 Kebijakan Perpajakan.....	23
2.3.1.1 Fiscal Policy Vs Tax Policy	23
2.3.1.2 Tax Reform	24
2.3.2 Hukum Pajak dan Undang-Undang Perpajakan Daerah	25
2.4 Administrasi Pajak	26
2.5 Pelimpahan Kewenangan Perpajakan	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Dilaksanakannya Penelitian.....	30
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Metode Pengumpulan Data	31
3.4 Teknik Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Pengaturan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	34
4.1.1 Objek Pajak BPHTB	34
4.1.2 Subjek dan Wajib Pajak BPHTB	36
4.1.3 Tarif Pajak BPHTB dan Perhitungan Pajak Terhutang.....	38
4.1.4 Pemungutan Pajak BPHTB	40
4.2 Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Atas Pelimpahan Kewenangan Pemungutan BPHTB	42
4.2.1 Dasar Hukum/Regulasi yang Mengatur Pajak Daerah (BPHTB) Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.....	44
4.2.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia	46

4.2.2.1 Tingkat pendidikan perangkat daerah yang bertanggungjawab mengelola pajak daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).....	48
4.2.2.2 Tingkat pemahaman responden terhadap pajak daerah khususnya mengenai teknik pengelolaan BPHTB	52
4.2.2.3 Pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan	56
4.2.3 Administrasi Pemungutan	58
4.2.3.1 Kelembagaan atau struktur organisasi dan tata kerja pemungutan BPHTB	58
4.2.3.2 Sarana dan prasarana pendukung	60
4.2.3.3 Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, kantor lelang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	62
4.2.3.4 Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat...	62
4.2.3.5 Unit pelayanan pajak yang tersedia.....	63
4.2.4 Kesiapan Pendanaan.....	63
4.3 Pembahasan Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh Atas Pelimpahan Kewenangan Pemungutan BPHTB.....	64

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	66
5.2 Implikasi Penelitian.....	67
5.3 Keterbatasan Penelitian	68
5.4 Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 4.2.1 Bagan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang BPHTB	46
--	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.2.2.1.A Rekapitulasi Pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan	49
Tabel 4.2.2.1.B Rekapitulasi Pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Payakumbuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel 4.2.2.2.A Tingkat Pemahaman Responden DPPKA Kota Payakumbuh Mengenai Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	54
Tabel 4.2.2.2.B Tingkat Pemahaman Responden DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Mengenai Teknis Pengelolaan Pajak Daerah.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Kabid Pendapatan DPPKAD	70
Lampiran 2 Kuisisioner	72
Lampiran 3 Data Pegawai DPPKAD.....	79
Lampiran 4 Jawaban Kuisisioner	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 menyatakan bahwa pembangunan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di segala bidang pemerintahan diperlukan dukungan dana yang besar baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pemerintah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan tidak akan terealisasi dengan baik.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan sesuai dengan sasarannya adalah dengan melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah merupakan suatu proses dinamis, yang memberikan

kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pembiayaan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang ada disamping mencari sumber-sumber penerimaan baru yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai wujud nyata terhadap komitmen otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sekaligus kemauan politik pemerintah untuk melakukan reformasi dan demokratisasi, pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan salah satu alternatifnya. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerah itu sendiri. Dalam upaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah,

meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem perpajakan dan distribusi daerah maka telah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penerbitan UU tersebut merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

Salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) adalah **penguatan *Local Taxing Power*** (memperluas basis pungutan daerah) dengan cara:

1. Memperluas objek pajak
2. Menambah jenis pajak
3. Menaikkan tarif maksimum
4. Diskresi (kewenangan) menetapkan tarif

Sebagai salah satu bagian dari *continuous improvement*, maka Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru ini setidaknya memperbaiki 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan daerah (*local taxing empowerment*).
3. Peningkatan efektifitas pengawasan.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur adanya penambahan 4 (empat) jenis pajak baru yang meliputi:

1. Pajak rokok
2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4. Pajak sarang burung walet

Dengan adanya penambahan 4 (empat) jenis pajak ini, maka secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah yang terdiri 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dari yang sebelumnya hanya terdiri 27 jenis retribusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Catatan penting sehubungan dengan berlakunya UU tersebut adalah ditetapkannya PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah yang sebelumnya merupakan golongan pajak pusat. Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009, pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah dilakukan mulai 1 Januari 2011 sedangkan PBB Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2014. Hal ini diatur di dalam Pasal 182 UU No. 28 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

2. Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang ini yang menjadi perhatian penting adalah tentang kesiapan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) pemda dalam mengelola PBB dan BPHTB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Dalam pemberlakuan BPHTB, proses pemindahannya akan berjalan lebih mulus karena tidak banyak memerlukan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Teknologi Informasi (TI). Namun demikian, untuk pemindahan PBB, walaupun berlaku efektif Tahun 2014, harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan beberapa hal mendasar seperti ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), tingkat pengetahuan, dan dukungan Teknologi Informasi (TI) sehingga proses pemindahan ke daerah dapat berlangsung mulus dan lancar.

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengalihan BPHTB dan PBB-P2 ke kabupaten/kota untuk pengelolaannya, yaitu:

1. Belum banyak daerah yang siap dengan Perda yang mengatur tata cara pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan PBB-P2. Apakah disebabkan oleh masa transisi yang terlalu cepat atau kapasitas daerah yang belum kuat?

2. Belum siapnya infrastruktur perangkat daerah terutama mengenai capacity building aparat pemerintah daerah yang terkait. Contoh, banyaknya SKPD yang memiliki *overcapacity* pegawai namun kekurangan tenaga profesional, terutama di bidang teknis keuangan daerah. Untuk daerah-daerah tertentu, tampaknya Kepala Menteri Keuangan harus bisa memetakan dan mengambil alih tanggungjawab dalam pola peningkatan-peningkatan kapasitas institusi daerah di bidang administrasi keuangan daerah.
3. Perangkat daerah harus dapat menjangkau kelompok wajib pajak yang selama ini tidak tersentuh oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Jangkauan dan kewenangan yang lebih spesifik merupakan pertimbangan utama, termasuk pola insentif dan disinsentif dalam rangka pengembangan kewilayahan di daerah.

Kondisi tersebut menuntut kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009), Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh merupakan daerah yang diberi wewenang dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan saat ini juga tengah mempersiapkan beberapa kebijakan/aturan pelaksanaan dan peraturan daerah yang mengacu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan uraian di atas terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan serta

mengimplementasikan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru (berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009), penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kesiapan Pemerintah Daerah Atas Pelimpahan Kewenangan Pemungutan BPHTB (Studi Kasus Perbandingan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Seberapa jauh kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB?”**

1.3 BATASAN PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Dibatasi pada kesiapan pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB.
2. Jangka waktu penelitian adalah bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2011, sehingga data/keadaan pada saat penelitian bisa saja berbeda dengan data/keadaan setelah penelitian.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh atas pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan bagi instansi terkait yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi .

Bab II Tinjauan Literatur. Bab ini berisi tentang tinjauan literatur yang diperlukan sebagai penunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini .

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini membahas metodologi atau langkah-langkah yang dilakukan Penulis dalam penelitian, metodologi tersebut meliputi tempat dan waktu dilaksanakannya penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian, di mana peneliti akan memaparkan secara detail dan akan menjelaskan temuan-temuan yang ada serta analisis dan pembahasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bagian penutup, di mana dalam bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, serta mengemukakan keterbatasan/kelemahan-kelemahan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti .

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BPHTB

2.1.1 Pengertian Kesiapan

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan perubahan kedua atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, maka dituntut kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan serta mengimplementasikan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, khususnya untuk pengelolaan BPHTB sebagai pajak daerah yang baru.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai aspek kesiapan pemerintah daerah, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari kesiapan. Pengertian kesiapan menurut beberapa orang ahli yaitu:

a. Menurut Chaplin (1989)

“Kesiapan adalah tingkat perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang menguntungkan untuk mempraktekkan sesuatu.”

b. Menurut Corsini (2002)

“Kesiapan adalah berkembang atau mempersiapkan diri dalam belajar dan memperoleh beberapa tugas perkembangan atau keahlian khusus berdasarkan perkembangan fisik, sosial dan intelektual.”

c. Menurut Dali Gulo (1983) dalam kamus psikologi

“Kesiapan diartikan sebagai suatu titik kematangan untuk menerima atau mempraktekan tingkah laku tertentu.

2.1.2 Beberapa Aspek Kesiapan Pemerintah Daerah

2.1.2.1 Tingkat Pemahaman Aparatur Pajak Terhadap Undang-Undang Pajak Daerah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, Edisi Kedua tahun 1994, Pengertian dari paham adalah :

- a. Pengertian; mengetahui banyak
- b. Pendapat; pikiran
- c. Aliran; haluan; pandangan
- d. Mengerti benar (akan) ; tahu benar (akan)
- e. Pandai dan mengerti benar.

Sedangkan pengertian pemahaman adalah proses, pembuatan, cara memahami atau memahami.

2.1.2.2 Kesiapan Operasional

Menurut Jeffrey L. Whitney, kesiapan secara operasional mengukur bagaimana sistem yang baru menjadi solusi dalam organisasi dan juga mengukur bagaimana respon dari pihak-pihak yang terkait dalam sistem tersebut. Selain itu Jeffrey L Whitney (1998:647) juga mengemukakan *usability analysis* yaitu:

- a. Sistem yang baru mudah untuk dipelajari, perlu diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan pelatihan pada karyawan.
- b. Sistem yang baru mudah digunakan artinya sistem yang baru dapat menghemat waktu untuk setiap aktivitas dengan hasil yang akurat dan system yang mudah untuk dipahami.
- c. Pengguna puas dengan adanya sistem baru.

Menurut Franciscus Xaverius Siola (1996:117-118), kesiapan operasional meliputi:

- a. Adanya studi-studi tentang perencanaan
- b. Adanya rencana kerja secara umum
- c. Fleksibel sesuai dengan waktu dan kebutuhan
- d. Lengkapnya laporan-laporan yang harus diserahkan dan data publikasinya
- e. Memadainya sumber daya manusia sebagai faktor esensial, pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem Pemda
- f. Adanya tanggung jawab, tugas dan kewajiban masing-masing Departemen dan Badan-Badan yang berpartisipasi, komposisi tim studi dengan jadwal waktu
- g. Alokasi personal
- h. Mampu menangani kondisi dan situasi yang tak terduga

2.1.2.3 Kesiapan Teknis

Kesiapan teknis dapat diartikan sebagai peralatan yang cukup dan baik dan setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan atau gerak aktivitas Pemda (Josef Riwu, 1991:62).

Menurut Jeffrey L. Whitney (1998:647) kesiapan teknis meliputi:

- a. Apakah sudah ada penggunaan teknologi?
 - 1. Apakah peralatan untuk pemanfaatan teknologi tersedia?
 - 2. Apakah teknologi yang digunakan merupakan teknologi canggih?
- b. Apakah sarana pendukung penerapan teknologi tersedia misalnya. kecukupan kapasitas listrik, ruangan yang memadai dan lain-lain?
- c. Apakah tenaga ahli tersedia?

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesiapan teknis adalah kesiapan yang menyangkut perangkat keras seperti gedung/ruangan, peralatan perkantoran seperti (komputer serta software-nya), kertas, meja, kursi, lemari dan sebagainya.

Menurut Josef Riwu (1991:184) peralatan dikatakan cukup dalam jumlah (kuantitas) apabila peralatan yang tersedia sebanding dan seimbang dengan volume kerja yang ada, dengan tenaga kerja yang membutuhkan ataupun sebanding dengan kebutuhan Pemda.

Dalam bukunya Prospek Otonomi Daerah di Indonesia Josef Riwu juga menjelaskan peralatan yang diterapkan hendaknya tidak menyulitkan bagi karyawan, artinya karyawan dengan mudah memakainya. Dibutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan peralatan sesuai dengan metode yang ada, untuk itu dapat digunakan cara seperti mengidentifikasi kemampuan karyawan sebelum mengadakan peralatan, artinya mengadakan pemilihan peralatan sesuai dengan tenaga atau karyawan yang ada, jika tidak ada yang memenuhi standar maka karyawan perlu diikutsertakan dalam pelatihan. Di samping itu diperlukan manajemen peralatan yang baik yang mencakup proses penelitian dan penentuan

kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, tata ruang pemeliharaan standarisasi serta penyusutannya.

2.1.2.4 Kesiapan Jadwal dan Dana

Dalam menerapkan suatu sistem yang baru ada satu hal yang memegang peranan penting di samping kesiapan secara teknis dan operasional yaitu kesiapan dari segi jadwal penerapan dan dana yang tersedia.

Menurut Jeffrey L. Whitney (hal 648) kesiapan dari segi jadwal meliputi apakah waktu yang ditetapkan masuk akal atau tidak, artinya apakah jadwal yang ada sudah mempertimbangkan berbagai hal yang terkait, jika jadwal tersebut tidak memungkinkan, tidak ada salahnya pengunduran jadwal dilakukan.

Josef Riwu (1991:187) menyatakan agar lebih efektif dalam penerapannya, Pemda memiliki suatu jadwal/schedule tahap-tahap penerapan suatu sistem agar dalam pelaksanaan lebih tertib dan terencana serta penerapan sistem tidak mengganggu kelancaran aktivitas yang ada.

Kesiapan dari segi dana menurut Jeffrey L. Whitney (1998:648) dapat dilihat dari tersedianya dana untuk menerapkan sistem yang baru dan dilakukan analisis untuk mengetahui bahwa biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari manfaat yang akan diperoleh. Analisis ini disebut *Cost-Benefit Analysis*.

2.2 PAJAK DAERAH

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri

sesuai dengan potensinya masing-masing. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pembebanan pada masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang (UU).

Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur, antara lain jenis, objek, subjek, dasar pengenaan, dan tarif pajak daerah maupun retribusi daerah, serta ketentuan umum yang mengatur tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Selain jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam UU dan PP tersebut, untuk daerah kabupaten/kota juga diberikan kewenangan menetapkan jenis pajak dan retribusi baru sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU, sedangkan untuk daerah provinsi hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi baru di luar yang ditetapkan dalam UU. Ada beberapa definisi pajak daerah, yaitu:

- a. Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Sedangkan menurut K.J Davey (1998:39) pajak daerah adalah:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan atau (opsen) oleh pemerintah daerah.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pajak daerah merupakan iuran kepada daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. Pajak propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| a. Pajak Hotel, | g. Pajak Parkir, |
| b. Pajak Restoran, | h. Pajak Air Tanah, |
| c. Pajak Hiburan, | i. Pajak Sarang Burung Walet, |
| d. Pajak Reklame, | j. Pajak Bumi dan Bangunan |
| e. Pajak Penerangan Jalan, | Perdesaan dan Perkotaan, |
| f. Pajak Mineral Bukan Logam | k. Bea Perolehan Hak atas Tanah |
| dan Batuan, | dan Bangunan. |

Walaupun telah ditetapkan demikian, pemerintah propinsi atau kabupaten/kota dapat saja tidak memungut salah satunya jika potensi pajak tersebut dipandang kurang memadai dan sebaliknya pemerintah kabupaten/kota dapat saja memungut pajak yang lainnya berdasarkan peraturan daerah selain pajak yang telah ditetapkan dengan catatan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.
5. Potensinya memadai artinya bahwa hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

8. Menjaga kelestarian lingkungan, artinya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan.

2.2.3 Kriteria Perpajakan Daerah

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak pusat yang memungut adalah Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kriteria pajak daerah secara spesifik diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pemerintah pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

Menurut Davey (1988), ada 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan itu agar dapat menjadi objek pengenaan pajak daerah, meliputi:

1. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama sumber pendapatan yang dapat dipajaki adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Keadaan demikian sangat

diharapkan, karena pajak-pajak tersebut menunjukkan elastisitasnya, yakni kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran Pemerintah. Dalam hal lain elastisitas tergantung pada kepekaan keputusan yang diambil atau tuntutan atas kemampuan administrasinya. Elastisitas merupakan kualitas atau sumber pajak yang penting.

2. Keadilan

Pada prinsipnya beban pengeluaran pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat secara proporsional dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Dengan demikian, sistem perpajakan akan baik apabila progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem tersebut cukup memadai apabila proporsional, yakni persentase pendapatan yang dipajaki sama untuk setiap tingkat pendapatan. Akan tetapi sistem ini buruk apabila regresif, yaitu jika persentase pendapatan yang dipajaki menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini harus dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak mesti seimbang antara kelompok masyarakat yang berbeda di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban mesti seimbang antara kelompok dengan sumber pendapatan yang berbeda, orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau, misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horisontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang

berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan lain.

3. Kemampuan administratif

Tuntutan kemampuan administratif dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, dimana pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik sedemikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah.

4. Diterima secara politis

Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak, apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun demikian, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Dengan demikian, untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya.

5. Kesesuaian sebagai pajak daerah

Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak. Pertama, terkait dengan persoalan apakah sudah cukup jelas kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak mesti dibayarkan.

Kedua, terkait dengan persoalan pertama itu, apakah tempat pengumpulan pajak yang *feasible* adalah juga tempat pembayaran secara efektif dilakukan. Ketiga, menyangkut kemungkinan variasi dalam penerapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Idealnya, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaitu *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara. Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo dan Ilyas (1999) yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada fiskus dalam menentukan jumlah hutang pajak sebagai kewajiban Wajib Pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib Pajak bersifat pasif
3. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus

b. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah hutang pajaknya. Ciri-ciri sistem ini adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung, memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3 SISTEM PERPAJAKAN DAERAH

Sistem perpajakan (*tax system*) adalah pola pelaksanaan perpajakan yang terkoordinasi secara serasi meliputi *tax policy*, *tax law* dan *tax administration*. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Untuk mewujudkan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat, maka ketiga faktor tersebut harus berjalan secara seimbang dan harmonis (sinergis). Sehingga dalam pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan daerah. Di sisi lain, usaha pelaksanaan sistem perpajakan daerah yang baik dan sehat dapat melalui sistem perpajakan yang sederhana, mudah dan jelas, intensifikasi pemungutan pajak, pemeliharaan aparat pajak yang jujur dan bersih dan peningkatan kualitas kemampuan aparat pajak.

2.3.1 Kebijakan Perpajakan

Istilah fiskal berasal dari bahasa latin '*fiscalis*' dan *fiscalis* berasal dari kata benda *fiscus* (Perancis, '*fisc*') yang berarti keranjang uang. Dalam perkembangannya diartikan sebagai kas negara. Dalam hal ini diartikan sebagai kas daerah.

Perkembangan selanjutnya kata *fiscus* sering dikaitkan dengan perpajakan yang memiliki arti berbeda yaitu diartikan pihak yang memungut pajak dalam hal ini pemerintah daerah. Sehingga timbul persepsi masyarakat bahwa kebijakan fiskal (*fiscal policy*) disamakan dengan kebijakan pajak (*tax policy*), padahal keduanya memiliki arti yang sangat berbeda.

2.3.1.1 Fiscal Policy Vs Tax Policy

Menurut John F. Due (Due, 1984) dalam bukunya *Government Finance: Economic Of The Public Sector* mengemukakan *Fiscal Policy* adalah kebijakan tentang penyesuaian antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar tercapai stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama dengan kebijakan moneter atau kebijakan kredit. Faktor yang menyamakan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter ini karena sasaran kedua kebijakan tersebut berusaha untuk mencapai tujuannya dengan mengubah posisi cadangan bank komersial. Baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter, keduanya saling melengkapi atau dikoordinasikan untuk digunakan mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Ada tiga tujuan utama kebijakan fiskal yaitu:

1. Laju pertumbuhan ekonomi

2. Memelihara kestabilan harga yang wajar
3. Meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu tercapai tujuan-tujuan lainnya.

Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai berbagai upaya atau tindakan pemerintah untuk melakukan penyesuaian antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai stabilitas ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi yang mantap dan keberhasilan pembangunan.

Tax policy adalah kebijakan mengenai perubahan sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan perkembangan, tujuan ekonomi, politik dan sosial pemerintah. Dari pengertian *tax policy* ini, maka dapat dikatakan bahwa *fiscal policy* lebih luas dibandingkan dengan *tax policy*. *Tax policy* hanyalah merupakan bagian dari *fiscal policy*, misalnya *tax reform* yang dilakukan tahun 1983. Adanya *tax reform* ini pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, dalam rangka untuk mencapai kemandirian pembiayaan dan pembangunan negara dan bangsa.

2.3.1.2 Tax Reform

Tax reform pajak daerah merupakan bagian dari *tax reform* secara nasional, terjadi pada tahun 1983. Karena pada tahun 1983 ini terjadi perubahan yang sangat mendasar dari sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dari *official assessment system* (berlaku sampai dengan tahun 1983) diubah menjadi *self assessment system* (diberlakukan mulai tahun 1984). Tujuan utama *tax reform* adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak untuk menegakkan kemandirian

dalam membiayai pembangunan nasional. Upaya kebijakan pajak yang ditempuh antara lain:

- a. Penyederhanaan struktur perpajakan meliputi jenis, tarif, dan tatacara pembayaran
- b. Pemerataan pengenaan dan pembebanan pajak yang makin adil dan wajar
- c. Mengusahakan adanya kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus
- d. Pembenahan aparatur perpajakan baik prosedur, tatakerja, disiplin, penyelundupan maupun penyalahgunaan wewenang.

2.3.2 Hukum Pajak dan Undang-Undang Perpajakan Daerah

Hukum pajak memuat hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana dengan acara pidananya. Karena memuat hukum tata negara yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya maka sering hukum pajak dianggap sebagai bagian dari hukum publik. Di sisi lain, sering juga disebut merupakan bagian dari hukum administrasi karena dalam hukum pajak peradilan administratif diatur dengan sangat rapi. Namun, ada juga yang menolak bila hukum pajak dimasukkan bagian dari hukum administrasi. Karena hukum pajak memiliki tujuan yang berbeda dengan hukum administrasi pada umumnya yaitu sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Lagi pula hukum pajak memiliki *terminology* tersendiri.

Hukum pajak biasanya diartikan sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai *fiscus* dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Produk hukum pajak berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun pemerintah, yaitu:

1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. UU No. 34 Tahun 2000 yaitu Perubahan UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. UU No. 28 Tahun 2009 yaitu Perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.4 ADMINISTRASI PAJAK

Adanya pembaharuan sistem perpajakan daerah yang lebih sederhana, diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami baik oleh masyarakat maupun aparat pajak daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keberhasilan dalam penerimaan pajak daerah sangat ditunjang oleh pelaksanaan administrasi perpajakan daerah yang baik dan efektif. Selain pelaksanaan administrasi perpajakan daerah yang baik dan efektif, juga masalah produktivitas administrasi perpajakannya. Produktivitas administrasi perpajakan dipengaruhi oleh:

1. Materi UU perpajakan dan peraturan-peraturan lainnya
2. Wadah organisasi instansi perpajakan dan perlengkapan penunjangnya
3. Keterampilan, kejujuran dan pengabdian aparatur perpajakan
4. Kesadaran dan pemahaman WP terhadap UU dan peraturan perpajakan yang berlaku
5. Lingkungan, kondisi sosial-politik yang ada

Dengan demikian pengelolaan pajak daerah akan baik jika pengadministrasian pemungutan pajak daerah juga baik.

Sementara itu Mansury (2000:1) mengemukakan bahwa *Tax Administration is the key to tax policy*, faktor yang perlu diperhatikan dan dikaji dengan seksama untuk berhasilnya dicapai sasaran kebijakan pembangunan adalah *tax administration* yang merupakan kunci tercapainya kebijakan perpajakan. Menurutnya, Administrasi perpajakan mengandung tiga pengertian, yakni:

1. Instansi atau badan yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemungutan pajak.
2. Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
3. Kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dalam kebijaksanaan perpajakan, berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

2.5 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERPAJAKAN

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya.

Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: fungsi budgeter dan fungsi regulator. Fungsi budgeter yaitu bila pajak sebagai alat untuk mengisi kas daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan

pembangunan. Sementara, fungsi regulator yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya: pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

Menurut Teresa Ter-Minassian (1997:3), beberapa kriteria dan pertimbangan yang diperlukan dalam pemberian kewenangan perpajakan kepada tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. Pajak yang dimaksudkan untuk tujuan stabilitas ekonomi dan cocok untuk tujuan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat.
- b. Basis pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pembayar pajak merelokasi transaksi ekonominya dari daerah yang kena pajak atau beban pajaknya tinggi ke daerah yang tidak kena pajak atau beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
- d. Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti bahwa pajak seharusnya jelas bagi pembayar pajak daerah, objek dan subjek pajak dan besarnya pajak terutang dapat dengan mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan fiskal vertikal yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relatif mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti identifikasi jumlah pembayar pajak, penegakan hukum (law-enforcement) dan komputerisasi.
- h. Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dialokasikan bagi pembayar pajak lokal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU DILAKSANAKANNYA PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.

Subjek penelitian adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada bidang pendapatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2011.

3.2 JENIS PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis bisa dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, antara lain:

- a. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 1999).

Penelitian jenis ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu permasalahan agar dapat ditemukan jawabannya, jawaban masalah tersebut disajikan dengan menggambarkan keadaan subjek/objek berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

- b. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian terapan, artinya pada penelitian ini hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh berbagai kalangan (Samudra, 2008:21), terutama oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah cara memperoleh data dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden yang telah dipersiapkan sebelumnya (Sumardjono, 1997:42).

Kuisisioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman teknis perangkat daerah mengenai pajak daerah dan pemungutan pajak daerah khususnya BPHTB.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Bidang Pendapatan yang bekerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden (Singarimbun & Effendi, 1989: 134).

Penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai BPHTB.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan untuk memperoleh data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Rachman Maman, 1999:96).

Untuk melengkapi data dalam penelitian, Penulis mengumpulkan beberapa dokumen berupa data peraturan daerah dan rinciannya serta data pegawai DPPKA.

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Arikunto dalam Ramayanti (2010:37) mengatakan bahwa ada dua metode yang bisa digunakan dalam menganalisis data lapangan:

a. Metode Deskriptif

Metode ini adalah metode analisis yang menggambarkan suatu keadaan secara objektif, sehingga memperoleh penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

b. Metode Komparatif

Metode ini dipergunakan dalam penarikan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah diuji kebenarannya dengan membandingkan teori yang merupakan kebenaran umum dengan data di lapangan.

Penelitian ini menggunakan kedua metode di atas. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk memperoleh fakta-fakta di lapangan dan menggunakan metode komparatif untuk menarik kesimpulan.

Untuk operasional menganalisis data kuisioner, penulis menggunakan teknik skala nominal berupa skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek (Sugiyono, 2001). Apabila jawaban benar maka diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol. Apabila skor sama dengan atau di atas nilai median skor berarti justifikasi diterima. Sebagai contoh, jika kita mengukur tingkat pemahaman dengan 9 item pertanyaan, berarti nilai mediannya 4,5. Jika ternyata responden memiliki skor sama atau di atas nilai median, berarti responden telah paham.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISIS PENGATURAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

4.1.1 Objek Pajak BPHTB

Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Perolehan hak tersebut dapat dalam bentuk:

1. Pengalihan/pemindahan hak atas tanah dan bangunan serta
2. Pemberian hak baru atas tanah dan bangunan yang bisa berupa kelanjutan dari pemindahan hak serta diluar pelepasan hak.

Secara rinci objek pajak ini telah diatur oleh pasal 85 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang meliputi:

a. Pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak;
 - i. hak milik;
 - ii. hak guna usaha;
 - iii. hak guna bangunan;
 - iv. hak pakai;
 - v. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - vi. hak pengelolaan
 2. Atau di luar pelepasan hak.

Di dalam pengelolaan pajak juga perlu diatur objek pajak yang dikecualikan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 juga secara jelas mengatur pengecualian tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 84 ayat 4 yang berbunyi:

“Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- e. Orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
- f. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

4.1.2 Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Menurut pasal 86 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Untuk menghitung jumlah pajak yang dikenakan, maka perlu ditentukan dasar pengenaan pajak atau yang dikenal dengan istilah basis pajak. Menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Nilai Perolehan Objek Pajak tersebut dihitung dalam hal:

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Jika Nilai Perolehan Objek Pajak huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

4.1.3 Tarif Pajak BPHTB dan Perhitungan Pajak Terhutang

Pasal 88 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa tarif BPHTB setinggi-tingginya adalah sebesar 5% (lima persen), dan ketentuan lebih lanjut tentang tarif BPHTB diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan ini juga mengisyaratkan bahwa Perda dapat saja menetapkan tarif lebih rendah dari 5% jika tarif ini dianggap terlalu memberatkan bagi masyarakat. Namun karena selama ini tarif BPHTB sebagai pajak pusat telah ditetapkan sebesar 5% dan telah dikenakan sejak lama dan dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, maka untuk Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh tetap dengan tarif 5%.

Cara menghitung besaran pokok BPHTB diatur pada pasal 89 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yaitu

1. Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP)
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 telah mengatur bahwa besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri,

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut tentang NPOP-TKP ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa Peraturan Daerah dapat saja menetapkan NPOP-TKP yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Namun menetapkan NPOP-TKP lebih tinggi dari ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 berarti mengurangi potensi pajak yang akan diterima.

Dalam pasal 90 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 diatur tentang saat terutangnya pajak BPHTB, sebagai berikut:

- a. untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. untuk tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. untuk hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. untuk hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- e. untuk waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
- f. untuk pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. untuk pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. untuk putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. untuk pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

- j. untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. untuk penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. untuk peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. untuk pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. untuk hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. untuk lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang.

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak tersebut.

4.1.4 Pemungutan Pajak BPHTB

Pemungutan pajak BPHTB dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak boleh diborongkan seperti halnya pemungutan pajak daerah lainnya. Pemda disarankan untuk menggunakan sistem *self assessment* (menghitung dan membayar sendiri) bagi BPHTB agar terjadi efisiensi pemungutan. Namun sistem ini harus diperkuat dengan melakukan pengaitan dengan sistem pembuatan akte dan menuntut kesadaran wajib pajak. Selain itu, sistem ini mengharuskan Pemda untuk melakukan penelitian terhadap jumlah yang dibayarkan wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi pelanggar. Untuk itu dapat dibuat ketentuan antara lain:

1. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan cara dibayar sendiri berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. SSPD disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

3. Pembayaran pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.
4. Pembayaran pajak yang tertang dilakukan di bank tempat pembayaran atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota/Bupati.

Untuk hal ini, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, mengaturnya dalam pasal 91 yang antara lain disebutkan:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- b. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- c. Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Untuk memperkuat ketentuan di pasal 91, maka di pasal 92 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan Tata Cara pelaporannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Serta adanya ancaman sanksi administrasi bagi pejabat sebagaimana diatur di pasal 93 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- b. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- c. Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 poin ke 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BPHTB

Persiapan pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah yang meliputi:

1. Dasar hukum/regulasi yang mengatur pajak daerah yang sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan SOP
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di kalangan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Tingkat pendidikan dan pengetahuan perangkat daerah
 - b. Ketersediaan jumlah tenaga profesional yang cukup di bidang teknis keuangan daerah
 - c. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
3. Administrasi pemungutan yang meliputi:
 - a. Kelembagaan atau struktur organisasi dan tata kerja pemungutan BPHTB
 - b. Sarana dan prasarana pendukung
 - c. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, kantor lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - d. Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat
 - e. Unit Pelayanan Pajak yang tersedia untuk wajib pajak.
4. Kesiapan Pendanaan

Apabila pemerintah daerah kota/kabupaten telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

maka pemerintah daerah dianggap telah siap dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB yang sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Berikut analisis mengenai aspek kesiapan pemerintah daerah dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB.

Analisis Aspek Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Pasal 8 ayat 1, aspek-aspek kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah:

4.2.1 Dasar Hukum/Regulasi yang Mengatur Pajak Daerah (BPHTB) Sesuai Dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Regulasi merupakan komponen utama dalam penerapan suatu kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang” hal ini berarti bahwa pajak yang dipungut tanpa adanya suatu undang-undang merupakan pungutan yang tidak sah atau dapat dikatakan suatu perampokan. Dengan demikian, jika peraturan daerah mengenai BPHTB tidak ada atau belum siap, maka pemerintah daerah tidak dapat memungut BPHTB.

SOP merupakan aturan yang berada di bawah peraturan daerah. SOP berisikan aturan yang lebih rinci dari peraturan daerah yang telah dibuat, yaitu petunjuk teknis yang harus dibuat untuk memperjelas aturan yang telah dibuat dalam peraturan daerah.

Peraturan daerah tentang BPHTB sebagai penjabaran dasar pelaksanaan disusun dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan pelaksanaan pemungutan BPHTB yang selama ini berlaku di Direktorat Jenderal Pajak serta disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kondisi objektif sesuai dengan kewenangan sebagai daerah otonom.

Analisis Mengenai Dasar Hukum/Regulasi yang Mengatur Pajak Daerah Khususnya BPHTB Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

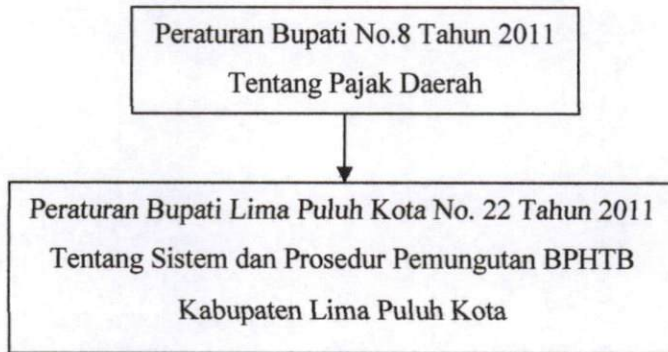
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum memiliki peraturan daerah yang mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena pajak BPHTB harus menjadi pajak daerah terhitung mulai awal 2011, maka Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota baru merampungkan peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) dan SOP mengenai pajak BPHTB berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Kelemahannya adalah walaupun pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah sudah dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, namun belum mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan Undang-Undang.

Dasar hukum tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut ini:

Bagan 4.2.1

Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang BPHTB



Tidak demikian halnya dengan Kota Payakumbuh, peraturan daerah, peraturan kepala daerah (Peraturan Walikota) dan SOP yang mengatur pajak daerah khususnya BPHTB masih dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh dan proses pengesahan. Berdasarkan keterangan dari salah satu pimpinan di Bidang Pendapatan, peraturan daerah tersebut telah disahkan oleh DPRD Kota Payakumbuh dan harus menunggu pengesahan/evaluasi dari gubernur.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pemerintah Kota Payakumbuh untuk saat ini belum bisa memungut pajak BPHTB hingga peraturan daerah tersebut selesai disahkan.

4.2.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mensukseskan tercapainya suatu tujuan organisasi. Pemerintah daerah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan BPHTB karena jika tidak,

pengalihan BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah hanya akan menimbulkan masalah sehingga dapat menurunkan pelayanan kepada masyarakat.

Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Berdasarkan peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh, kelembagaan yang memungut dan mengelola pajak BPHTB tetap berada pada satu SKPD yaitu dikelola oleh pegawai DPPKAD, dalam hal ini yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan pajak daerah adalah pegawai Bidang Pendapatan.

Potensi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga sangat dibutuhkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan pemerintah daerah khususnya pada DPPKA/DPPKAD sebagai petugas yang bertanggungjawab memungut dan mengelola pajak daerah.

Pengelolaan pajak BPHTB, tidak begitu memerlukan sumber daya manusia yang kompeten seperti halnya pengelolaan pajak PBB karena pengelolaan BPHTB tidak terkait dengan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP PBB). Dalam menentukan nilai pasar tanah untuk Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan BPHTB, sumber daya manusia/kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah adalah sumber daya manusia yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pemahaman yang baik mengenai ilmu kenotarisian/pertanahan terkait dengan aturan pertanahan/kenotarisian. Sehingga untuk mengetahui tersedia atau

tidaknya sumber daya manusia/kompetensi tersebut, maka kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan BPHTB dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya:

4.2.2.1 Tingkat pendidikan perangkat daerah yang bertanggungjawab mengelola pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)

Pendidikan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam mengemban atau melaksanakan tugas pelayanan umum. Negara dapat dikatakan maju jika penduduk dan aparatur pemerintahnya memiliki sumber daya manusia yang handal, tentunya diperoleh melalui tingkat pendidikan yang tinggi.

Kota-kota besar seperti Jakarta bisa saja sangat siap dengan faktor ini, namun yang menjadi pertanyaan adalah bagi daerah-daerah yang jauh dari ibukota, mengingat tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Hal ini akan menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan BPHTB khususnya pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

Analisis Tingkat Pendidikan Pegawai Bidang Pendapatan pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Jika diperhatikan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh, maka dapat disimpulkan bahwa kuantitas dan kualitasnya sangat terbatas dan sangat perlu untuk ditingkatkan.

Dengan ditingkatkannya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka pengelolaan sumber-sumber pajak yang potensial dapat direalisasikan menjadi penerimaan secara optimal.

Untuk lebih mengetahui jumlah dan tingkat pendidikan petugas pajak/pegawai DPPKAD, dapat diketahui dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2.1.A

Rekapitulasi Pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Ket	Disiplin Ilmu				Jumlah	
		Eko	Akt	Ilmu	Selain	Org	%
		(A)	(B)	Kenotarisan (C)	A,B & C		
1	S1	1	-	-	3	4	26,67
2	D3	1	-	-	-	1	6,67
3	SLTA	-	-	-	-	10	66,67
TOTAL						15	100,01

Sumber: Data Pegawai DPPKAD Kab.Lima Puluh Kota

Dari tabel di atas terlihat bahwa tidak terdapat sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ilmu pertanahan dan ilmu keuangan daerah khususnya perpajakan seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Selain itu jumlah pegawai aparat pajak juga relatif sedikit. Terbukti dari tabel di atas, bahwa jumlah pegawai bidang pendapatan yang mengelola pajak daerah hanya sebanyak 15 orang.

Sementara itu untuk pengelolaan pajak daerah terkait BPHTB membutuhkan jumlah petugas yang cukup banyak karena harus melakukan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

Berdasarkan tabel tersebut tingkat pendidikan pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh pendidikan SLTA, sedangkan tingkat sarjana hanya terdiri dari 4 orang pegawai dan 1 orang pegawai tingkat Diploma III. Pegawai dari jenjang S1 yang berlatar belakang ilmu ekonomi hanya terdiri dari 1 orang pegawai saja.

Melihat kenyataan ini, maka tingkat pendidikan pegawai di Bidang Pendapatan perlu ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas karena untuk pengelolaan pajak daerah khususnya pajak BPHTB sangat tidak mungkin dapat berjalan sesuai aturan jika hanya dengan mengandalkan pegawai dengan latar belakang pendidikan SLTA walaupun secara teknis keterampilan para pegawai sudah terlatih cukup baik, namun sebagaimana kita ketahui bahwa pada tingkat pendidikan SLTA tidak diberikan pengetahuan mengenai ilmu kenotarisian/pertanahan dan ilmu perpajakan seperti halnya perguruan tinggi.

Sedangkan untuk pengelolaan pajak daerah yang baru khususnya BPHTB sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan ahli di bidang kenotarisian/pertanahan dan pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB (mulai dari pengelolaan data objek pajak sampai pada aktivitas pengawasan, dsb). Terlebih lagi, pendidikan saat ini berperan penting dalam mengantisipasi perkembangan dan

perubahan global yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian suatu negara.

Tabel 4.2.2.1.B
Rekapitulasi Pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kota Payakumbuh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Ket	Disiplin Ilmu				Jumlah	
		Eko	Akt	Ilmu	Selain	Org	%
		(A)	(B)	Kenotarisan (C)	A, B & C		
1	S2	-	-	-	1	1	5,56
2	S1	1	-	-	3	4	22,22
3	D3	-	-	-	2	2	11,11
4	SLTA	-	-	-	-	10	55,56
5	SLTP	-	-	-	-	1	5,56
TOTAL						18	100,01

Sumber: Data Pegawai DPPKA Kota Payakumbuh

Dilihat dari segi kuantitas dan kualitas, keadaan pegawai di Bidang Pendapatan DPPKA Kota Payakumbuh tidak jauh berbeda dengan pegawai DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota. Bahkan masih ada pegawai yang berlatar belakang pendidikan SLTP dan juga didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA, sedangkan tingkat sarjana pada urutan kedua sebesar 22,22% (sebanyak 4 orang) dan 1 orang pegawai tamatan S2 dan 2 orang pegawai dari jenjang Diploma III. Jika diperhatikan dari disiplin ilmu, hanya 1 orang yang memiliki disiplin ilmu ekonomi.

Hal ini juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kota Payakumbuh karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya, walaupun keterampilan para pegawai sudah terlatih dengan cukup baik mengenai teknis pengelolaan pajak, tetapi tidak mungkin untuk pelayanan umum kepada masyarakat khususnya mengenai pajak BPHTB dapat dikelola dengan baik oleh pegawai yang hanya berlatar belakang pendidikan SLTA sebab pada tingkat pendidikan SLTA pengetahuan mengenai ilmu pertanahan dan ilmu perpajakan sudah jelas tidak diberikan seperti halnya perguruan tinggi.

Dalam pengelolaan pajak khususnya BPHTB dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam ilmu kenotaris/pertanahan dan perpajakan serta pengelolaan keuangan daerah. Karena jika tidak, maka akan menimbulkan masalah dan dapat menurunkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu sangat dibutuhkan peningkatan kuantitas maupun kualitas tingkat pendidikan di kalangan pemerintah daerah khususnya Bidang Pendapatan DPPKA Kota Payakumbuh agar pengelolaan pajak dan keuangan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan, sehingga penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

4.2.2.2 Tingkat pemahaman responden terhadap pajak daerah khususnya mengenai teknis pengelolaan BPHTB

Secara umum, pemahaman perangkat daerah terhadap implementasi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi ke dalam tiga kriteria utama yaitu: pengetahuan umum mengenai pajak daerah (Q1), pemahaman mengenai perubahan Undang-

Undang Pajak Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) (Q2) dan pemahaman mengenai pemungutan pajak daerah yang baru (sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) khususnya BPHTB (Q3).

Kriteria-kriteria tersebut diukur dalam bentuk pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner, pengetahuan umum mengenai pajak daerah dijabarkan melalui 7 buah pertanyaan, pemahaman mengenai perubahan undang-undang pajak daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) dijabarkan melalui 9 buah pertanyaan dan pemahaman responden mengenai pemungutan pajak daerah dijabarkan melalui 6 buah pertanyaan.

Pemahaman mengenai Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diukur dengan membandingkan jawaban yang benar dengan median dari total jawaban benar untuk masing-masing kriteria pengaturan pajak daerah di atas. Jika skor responden sama dengan atau di atas nilai median, maka responden dikatakan paham, sebaliknya jika skor responden di bawah nilai median maka responden dikatakan belum paham/kurang paham.

Nilai median untuk pengetahuan umum mengenai pajak daerah yang terdiri dari 7 buah pertanyaan adalah 3,5; nilai median untuk pemahaman terhadap perubahan Undang-Undang Pajak Daerah yang terdiri dari 9 buah pertanyaan adalah 4,5 dan nilai median untuk pemahaman mengenai pemungutan pajak daerah yang terdiri dari 6 buah pertanyaan adalah 3.

Responden dapat dikatakan paham terhadap Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah jika ketiga kriteria pemahaman tersebut mempunyai skor sama dengan atau di atas nilai median masing-masing kriteria.

Analisis Tingkat Pemahaman Responden DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPPKA Kota Payakumbuh Mengenai Teknis Pengelolaan Pajak Daerah, Khususnya BPHTB

Berdasarkan hasil pengolahan data kuisioner tersebut, jika ditinjau dari sisi pemahaman teknis, hampir seluruh pegawai Bidang Pendapatan pada DPPKA Kota Payakumbuh memiliki pemahaman yang baik mengenai teknis pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB. Hal ini terbukti dari 18 responden pegawai Bidang Pendapatan DPPKA Kota Payakumbuh, hanya 1 orang pegawai (5,56%) yang dinyatakan kurang paham.

Sedangkan pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 15 orang pegawai Bidang Pendapatan terdapat 3 orang pegawai (20%) yang kurang paham mengenai teknis pemungutan pajak daerah.

Tingkat pemahaman responden terhadap Pajak Daerah dan Undang-Undang Pajak Daerah khususnya BPHTB dapat diketahui dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2.2.A

Tabel Tingkat Pemahaman Responden DPPKA Kota Payakumbuh Mengenai Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No	Keterangan	Jumlah	
		Org	%
1	Responden Paham	17	94,44
2	Responden Kurang Paham	1	5,56
	TOTAL	18	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Berdasarkan tabel terlihat bahwa hampir seluruh responden memiliki pemahaman yang baik mengenai teknis pemungutan BPHTB. Dari 18 orang pegawai Bidang Pendapatan, hanya 1 orang pegawai (5,56%) yang kurang paham terhadap undang-undang pajak daerah khususnya teknis pemungutan BPHTB. Pemahaman responden terhadap undang-undang pajak daerah khususnya teknis pemungutan BPHTB sangat penting, karena jika aparat pemungut pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup, maka pengelolaan BPHTB tidak dapat berjalan dengan baik.

Tabel 4.2.2.2.B

**Tabel Tingkat Pemahaman Responden DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota
Mengenai Teknis Pengelolaan Pajak Daerah**

No	Keterangan	Jumlah	
		Org	%
1	Responden Paham	12	80
2	Responden Kurang Paham	3	20
	TOTAL	15	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian

Secara umum pegawai DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki pemahaman yang cukup baik, namun jumlah pegawai yang kurang paham terhadap undang-undang pajak daerah khususnya teknis pemungutan BPHTB lebih banyak jika dibandingkan dengan DPPKA Kota Payakumbuh. Dari 15 orang pegawai Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 3 orang pegawai yang masih kurang paham terhadap undang-undang pajak daerah khususnya teknis pemungutan BPHTB.

Terdapat perbedaan kondisi jika dibandingkan dengan latar belakang pendidikan pegawai masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan tabel tingkat pendidikan yang telah dibahas sebelumnya, pegawai masing-masing kabupaten/kota didominasi oleh pegawai berlatar belakang pendidikan SLTA. Tidak mungkin tingkat pemahaman yang baik mengenai perpajakan dapat diperoleh tanpa memiliki pendidikan yang relevan dengan bidang perpajakan itu sendiri. Hal ini mungkin saja disebabkan karena proses pengisian data kuisisioner yang tidak terorganisasi dengan baik atau bisa saja karena keterampilan pegawai yang memang sudah terlatih cukup lama sehubungan dengan teknis pemungutan pajak khususnya pajak daerah.

Walaupun demikian, salah satu usaha atau alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas adalah dengan melakukan bimbingan dan pelatihan secara terus menerus. Dengan demikian pemerintah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan mengenai bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti Universitas, Badan Diklat Keuangan, dsb.

4.2.2.3 Pengembangan SDM Melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan masa transisi untuk memperoleh transfer ilmu dari pemerintah pusat. Dalam rangka penyiapan sumber daya manusia, pemerintah daerah tidak mungkin dapat menduplikasi (*copy paste*) yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) karena dibutuhkan kompetensi/keahlian khusus dalam menangani BPHTB. Hal ini membutuhkan investasi tenaga, biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan atau magang-magang dengan bekerja sama dengan lembaga seperti Universitas atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)/Badan Diklat Keuangan Daerah dapat menjadi alternatif untuk membantu penyiapan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah dapat meminta bantuan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan bimbingan, pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan BPHTB.

Pelatihan ini diperlukan agar petugas pajak di lapangan dan di kantor dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak. Faktor ini dapat menentukan keberhasilan pegawai Bidang Pendapatan untuk menggali dan menarik pajak di lapangan semaksimal mungkin.

Analisis Mengenai Pengembangan SDM pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawai bidang pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pendidikan dan pelatihan pajak khusus PBB dan BPHTB yang diikuti oleh tiga orang pegawai yang dilakukan sebanyak tiga kali pada tahun 2010 dan pada akhir Maret 2011 perangkat daerah melakukan workshop mengenai PBB dan BPHTB.

Sementara itu di DPPKA Kota Payakumbuh, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah mengikuti pendidikan pajak dengan sistem pendidikan Online yang diikuti oleh lima

orang peserta selama satu bulan dan pada awal Desember 2010 mereka mengikuti pelatihan pajak ke Medan. Hal ini merupakan salah satu alternatif yang dilakukan dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia.

Namun, berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya pelatihan yang relevan dengan tugas yang diikuti oleh staf bidang pendapatan untuk masing-masing kabupaten dan kota. Tidak hanya PBB dan BPHTB, untuk pengelolaan pajak daerah, pegawai bidang pendapatan harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis mengenai pajak daerah secara keseluruhan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan pegawai dalam melakukan identifikasi objek, subjek dan melakukan penagihan pajak.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, dibutuhkan keterampilan teknis dan komunikasi yang baik karena membutuhkan pendekatan personal dengan wajib pajak. Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten/kota perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan atau magang kepada para pegawai yang bekerja di Bidang Pendapatan.

4.2.3 Administrasi Pemungutan

Kesiapan pemerintah daerah dari aspek administrasi pemungutan meliputi:

4.2.3.1 Kelembagaan atau struktur organisasi dan tata kerja pemungutan

BPHTB

Penyiapan struktur organisasi dan tata kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri, apakah struktur organisasi/kelembagaan yang mengurus pajak

daerah khususnya pemungutan dan pengelolaan BPHTB terpisah atau tetap berada dalam satu SKPD yang selama ini dikelola oleh DPPKA

Analisis Mengenai Kelembagaan/Struktur Organisasi Pengelolaan BPHTB

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kelembagaan yang mengelola pajak BPHTB pada pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh tetap berada pada satu SKPD yaitu dikelola oleh pegawai DPPKAD yang selama ini mengelola pajak daerah. Pada DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat tiga fungsi dalam struktur organisasi dan tata kerja pemungutan BPHTB, yaitu fungsi pelayanan, fungsi data dan informasi, dan fungsi pembukuan dan pelaporan.

Fungsi pelayanan bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB, fungsi data dan informasi bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak dan fungsi pembukuan dan pelaporan bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Begitu juga dengan DPPKA Kota Payakumbuh, walaupun peraturan daerah masih menunggu untuk disahkan, struktur organisasi dan fungsi yang dibentuk berdasarkan SOP dalam tata kerja pemungutan BPHTB juga memiliki tiga fungsi seperti halnya pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

4.2.3.2 Sarana dan prasarana pendukung

Penyiapan sarana dan prasarana dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah daerah. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa gedung kantor, perangkat pendukung (teknologi informasi) terutama komputer dan program (software) yang digunakan untuk mengolah data yang berkaitan dengan BPHTB, perlengkapan kantor seperti meja kantor dan kendaraan operasional, dsb.

Sarana dan prasarana bagi aparat petugas pajak sangat lah perlu. Terutama untuk petugas administrasi dan petugas lapangan. Bagi petugas admininistrasi, komputer merupakan kebutuhan yang sangat mutlak diperlukan. Oleh karena itu diperlukan keterampilan untuk mengoperasikan komponen komputer sebagai sarana perangkat lunak dan sebagai sarana perangkat keras. Dengan demikian sistem administrasi pajak lebih teratur, mudah dan cepat.

Di samping itu, guna meninjau lokasi/obyek pajak ke lapangan, untuk melakukan penagihan dan sebagainya, diperlukan sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Sarana dan prasarana tersebut jelas akan memperlancar dan menunjang keberhasilan dalam memaksimalkan pemungutan pajak.

Analisis Kesiapan Sarana dan Prasarana pada DPPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh

Karena pengelolaan pajak BPHTB pada Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh masih berada dalam satu SKPD, maka masih menggunakan gedung kantor DPPKA.

Untuk pengelolaan database terkait objek pajak, Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota hanya memiliki tiga buah komputer dan 1 unit laptop, sedangkan Bidang Pendapatan DPPKA Kota Payakumbuh memiliki 3 buah komputer dan 4 unit laptop. Jumlah ini merupakan angka yang kecil mengingat pengelolaan BPHTB membutuhkan dukungan teknologi informasi yang cukup agar proses pengolahan database objek pajak tidak terkendala.

Disamping dukungan teknologi informasi, juga dibutuhkan sarana perlengkapan kantor seperti meja kantor dan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana transportasi/kendaraan operasional. Untuk menjamin kelancaran tugas di lapangan terkait dengan peninjauan lokasi/obyek pajak maka sarana transportasi sangat dibutuhkan oleh setiap pegawai. Pada Bidang Pendapatan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota telah tersedia meja kantor sesuai dengan jumlah pegawai dan jumlah kendaraan operasional sebanyak 75% dari jumlah pegawai yang ada.

Begitu juga dengan DPPKA Kota Payakumbuh, juga telah tersedia meja kantor sesuai dengan jumlah pegawai yang ada, namun pegawai staff Bidang Pendapatan masih menggunakan kendaraan pribadi karena kendaraan operasional hanya diperuntukkan bagi pimpinan.

Dari uraian di atas, jika dilihat dari segi kuantitas, maka sarana dan prasarana dianggap masih relatif kurang memadai terutama untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lapangan. Jumlah komputer dan laptop masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada di Bidang Pendapatan. Jumlah kendaraan operasional juga masih terbatas, terutama pada DPPKA Kota Payakumbuh.

Untuk selanjutnya pemerintah daerah perlu meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan pembangunan sistem yang terintegrasi dengan sistem administrasi pemerintahan lainnya.

4.2.3.3 Kerja sama dengan pihak terkait, antara lain Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, kantor lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti yang telah ditentukan dalam peraturan menteri keuangan tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.

4.2.3.4 Pembukaan rekening BPHTB pada bank yang sehat

Sejak awal Januari 2011, rekening BPHTB yang berada di pusat telah ditutup karena pengelolaan pajak BPHTB tidak lagi menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki rekening BPHTB sebagai tempat penerimaan kas daerah.

Begitu juga dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, walaupun peraturan daerah mengenai BPHTB belum selesai disahkan, namun pemerintah daerah Kota Payakumbuh telah memiliki rekening BPHTB. Dalam hal ini, pihak perbankan yang dipercayakan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah Bank Nagari/Bank Pembangunan Daerah.

4.2.3.5 Unit pelayanan pajak yang tersedia

DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki fungsi pelayanan pajak BPHTB yang bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB. Khusus pelayanan PBB selama ini sudah ada tim intensifikasi PBB, Kolektor PBB Kecamatan, Kolektor PBB Nagari dan Tempat Pembayaran PBB, namun untuk unit layanan pajak daerah secara keseluruhan belum dibentuk.

Sama halnya dengan DPPKAD Kabupaten Lima Puluh Kota, pada DPPKA Kota Payakumbuh unit layanan yang tersedia hanya untuk retribusi. Unit layanan pajak daerah secara keseluruhan sampai saat ini juga belum dibentuk.

4.2.4 Kesiapan Pendanaan

Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh mengakui bahwa pendanaan untuk persiapan BPHTB memang membutuhkan biaya yang cukup besar terkait dengan persiapan sumber daya manusia dan persiapan administrasi pemungutan BPHTB yang meliputi sarana prasarana pendukung dan kebutuhan lain sehubungan dengan administrasi pemungutannya.

Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengalihan BPHTB sudah dianggarkan dalam beban APBD masing-masing. Apalagi nantinya masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan diri untuk tahap pengalihan PBB sebagai pajak daerah baru yang mulai berlaku awal Januari 2014.

4.3 PEMBAHASAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH ATAS PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BPHTB

1. Peraturan Daerah mengenai BPHTB

Walaupun peraturan kepala daerah (Peraturan Bupati) sebagai landasan hukum untuk melakukan pemungutan BPHTB sudah ada, namun kelemahannya adalah pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum merampungkan peraturan daerah mengenai pajak daerah yang mengacu kepada Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Seperti yang telah diuraikan pada tinjauan literatur bahwasanya pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang, jika tidak dapat dikatakan sebagai tindakan perampokan.

Sedangkan Kota Payakumbuh masih menunggu pengesahan rancangan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan SOP sehingga Kota Payakumbuh belum bisa memungut BPHTB hingga peraturan tersebut disahkan.

2. Sumber daya manusia

Faktor yang menjadi persoalan bagi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional terkait dengan ilmu kenotarisian/pertanahan, ilmu perpajakan dan pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sangat diharapkan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh untuk mempersiapkan jumlah tenaga profesional yang dibutuhkan

dalam pengelolaan pajak daerah khususnya BPHTB agar pengelolaan keuangan daerah tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

3. Administrasi pemungutan

Secara umum pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dapat dikatakan siap dalam administrasi pemungutan, yang harus dilakukan adalah penambahan jumlah sarana dan prasarana terutama teknologi informasi agar dapat memudahkan pengolahan data objek pajak dan pengelolaan penerimaan daerah.

Selain itu, masing-masing pemerintah kabupaten/kota harus memiliki unit pelayanan pajak agar dapat berinteraksi langsung dalam melayani masyarakat (wajib pajak) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Kesiapan Pendanaan

Segala kebutuhan pendanaan untuk pengalihan pengelolaan BPHTB telah dianggarkan pada beban APBD masing-masing pemerintah kabupaten/kota seperti yang telah diamanatkan peraturan menteri keuangan dan menteri dalam negeri tentang tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai pajak daerah.

BAB V

PENUTUP

Penelitian ini adalah penelitian terapan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Payakumbuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2011. Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis peroleh, berikut disajikan kesimpulan terhadap permasalahan implikasi dari penelitian ini, serta saran dan keterbatasan dalam penelitian yang Penulis lakukan.

5.1 KESIMPULAN

Kesiapan dinilai berdasarkan aspek kesiapan pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB. Aspek tersebut ditinjau dari beberapa faktor, yaitu ketentuan Undang-Undang/dasar hukum mengenai pajak daerah khususnya BPHTB, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, kesiapan administrasi pemungutan pajak daerah khususnya BPHTB dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pendanaan masing-masing kabupaten dan kota.

Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota dinilai sudah siap dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB. Walaupun peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih belum rampung, namun pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota telah memiliki peraturan kepala daerah tentang pemungutan pajak BPHTB. Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat dikatakan telah siap dalam administrasi pemungutan serta pendanaannya. Masalah utama adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan tenaga profesional di bidang kenotaris/ilmu pertanahan, pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Kesiapan SDM membutuhkan investasi biaya dan waktu yang tidak sedikit. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus agar pengelolaannya tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Untuk Kota Payakumbuh, jika ditinjau dari peraturan daerah saat ini Kota Payakumbuh masih belum siap dalam pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB karena peraturan daerah yang menjadi landasan hukum pemungutan pajak BPHTB masih belum selesai disahkan, selain peraturan daerah, peraturan kepala daerah (Peraturan Walikota) dan SOP nya juga masih dalam proses pengesahan. Meskipun persiapan administrasi dan pendanaan telah dilakukan, namun yang menjadi masalah utama selain peraturan daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan BPHTB. Dengan demikian, sangat diharapkan kesiapan pemerintah Kota Payakumbuh dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB terlebih pada kesiapan Sumber Daya Manusianya.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB. Karena dari hasil penelitian diperoleh data bahwa pemerintah daerah harus

mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan tenaga profesional di bidang kenotarisasi/ilmu pertanahan, pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kekacauan dalam mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dan tentunya tidak merugikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Jika perangkat daerah telah memiliki kesiapan yang matang dalam melaksanakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 maka upaya memperbaiki struktur penerimaan dan peningkatan pendapatan daerah serta pengelolaan pajak daerah dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan topik/tema yang sama, namun dengan menggunakan metode yang lebih kompleks.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang mungkin mengganggu hasil penelitian, yaitu:

1. Penulis hanya menganalisis aspek-aspek kesiapan pemerintah daerah sebagai variabel/tolak ukur dalam menentukan kesiapan pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB.
2. Kuisisioner yang digunakan untuk mengukur pemahaman perangkat daerah belum tentu menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Sebagaimana yang dijelaskan Suhaimi Arikunto dalam bukunya "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", ada beberapa kelemahan dari penelitian yang menggunakan kuisisioner

sebagai instrumennya yaitu: responden sering tidak teliti dan tidak jujur dalam menjawab pertanyaan dan sukar dicari validitasnya.

3. Karena keterbatasan dana dan waktu, maka periode penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Maret, sehingga data/keadaan pada saat penelitian bisa saja berbeda dengan data/keadaan setelah penelitian.

5.4 SARAN

Sehubungan dengan hasil penelitian yang diperoleh, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pemda setempat lebih mematangkan persiapannya dalam pengalihan pemungutan pajak daerah yang baru, khususnya BPHTB baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun dalam administrasi pemungutannya.
2. Sangat disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak literatur dan memperpanjang waktu penelitian sehingga variabel/tolak ukur yang digunakan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan pemungutan BPHTB semakin beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dep. Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, **Pelengkap Buku Pegangan 2009 Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia**, Jakarta, 2009.
- Devano, Sony, Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana
- <http://farahline.blogspot.com/2010/11/menimbang-kesiapan-pendaerahan-pajak.html>
- <http://economy.okezone.com/read/2010/10/08/20/380496/20/proses-pengalihan-pajak-pemda-harus-siapkan-5-hal>
- <http://eddiwahyudi.wordpress.com/2010/12/31/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah/>
- <http://pusatperpajakan.blogspot.com/2011/01/pengalihan-bphtb-menjadi-pajak-daerah.html>
- http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/20100615344/kegiatan/dukungan-bdk-malang-dalam-penerapan-uu-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah.html?width_set=widefixed
- http://www.beritajakarta.com/2008/id/berita_detail.asp?nNewsId=38900
- http://unrika.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=70
- <http://fairuz08.wordpress.com/2010/04/13/tinjauan-pelaksanaan-bphtb-sebagai-pajak-daerah-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pdrd/>
- <http://sulistnugroho.blogspot.com/2010/11/pengalihan-bphtb-dan-pbb-p2-ke-pemda.html>
- <http://qodrihaq.blogspot.com/2010/11/pengalihan-pemungutan-bea-perolehan-hak.html>
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi II*. Yogyakarta: Andi

- Prajnajati, Prawerti. 2010. Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Kajian Isu-Isu Strategis*. (Online), (<http://litbang.magelangkota.go.id/index.php>), diakses 21 Januari 2011
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Pusat Studi Keuangan Daerah dan DPPKA Kota Padang. 2010. *Naskah Akademis Ranperda Pajak BPHTB*. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 Nomor 53 Tahun 2010 *Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah*
- Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah*
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 *Tentang BPHTB*
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Widodo, Widi, Dedy Djefris. 2008. *Tax Payer's Rights*. Bandung: Alfabeta

Lampiran 1

Pertanyaan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan di DPKD Kabupaten Lima Puluh Kota dan DPPKA Kota Payakumbuh.

1. Terkait dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2009, pemda dituntut untuk menyiapkan perda yang mengatur pemungutan pajak daerah mengenai PBB dan BPHTB. Jika perda belum siap, maka pemda tidak dapat memungut BPHTB sebagai pajak daerah. Apakah Kota/Kab. telah memiliki perda yang dimaksud? Jika sudah, apa perda yang mengatur tentang itu?
2. Pengelolaan BPHTB membutuhkan Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten di kalangan Pemerintah Daerah.
 - Menurut Bapak/Ibu apakah tingkat pendidikan dan pengetahuan perangkat daerah yang ada di kalangan pemda saat ini sudah memenuhi syarat yang ditentukan? Jika belum bagaimana cara untuk menanggulangi hal itu?
 - Untuk mengelola data PBB dan BPHTB dibutuhkan jumlah tenaga profesional yang cukup banyak di bidang teknis keuangan daerah. Menurut Bapak, dengan ketersediaan pegawai yang ada saat ini, apakah diperlukan penambahan transfer pegawai atau tenaga profesional agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik? Jika diperlukan, bagaimana prosedur penambahan pegawai yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan? Karena untuk mengelola PBB dan BPHTB tidak dapat dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki keahlian/kompetensi di bidang itu.
 - Salah satu alternatif dalam pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Apakah pegawai di kalangan pemda sudah melakukan pendidikan dan pelatihan tersebut? Berapa jangka waktu pendidikan/pelatihan tersebut? dan Berapa kali program ini sudah dijalankan oleh pemda?
3. Dalam hal administrasi pemungutan, pemda dapat menduplikatkan sistem yang selama ini dijalankan oleh dirjen pajak,
 - Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja pemungutan BPHTB dan PBB P2 yang telah terbentuk saat ini? Apakah sudah sesuai dengan struktur organisasi seperti yang selama ini dijalankan oleh dirjen pajak?
 - Untuk mengolah data yang berkaitan dengan PBB dan BPHTB dibutuhkan sarana dan prasarana yang meliputi perangkat pendukung (Teknologi Informasi), terutama komputer

dan program (software). Berapa jumlah sarana dan prasarana yang sudah dimiliki oleh pemda? Apakah jumlah tersebut sudah memenuhi kebutuhan untuk mengelola PBB dan BPHTB? Jika belum, bagaimana cara menanggulangnya?

- Dalam pengelolaan pajak daerah khususnya PBB dan BPHTB dibutuhkan kerjasama dengan instansi terkait seperti Kantor Pelayanan Pajak, perbankan, kantor pertanahan, kantor lelang dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Apakah kerjasama tersebut sudah berjalan? Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan?
 - Pembukaan rekening penerimaan BPHTB dan PBB-P2 pada bank yang sehat. dalam hal ini Bank apa yang dipercayakan pemerintah daerah? Apakah pelaksanaan ini sudah dilakukan oleh bank yang bersangkutan?
4. Sejauh ini, apakah pemerintah Kota/Kab sudah siap dalam melaksanakan Undang-Undang tersebut ditinjau dari berbagai aspek di atas?
 5. Walaupun pemda dirugikan dengan hilangnya penerimaan daerah dari DBH Pajak PBB dan BPHTB, apa keuntungan yang diperoleh pemda dengan menerapkan Undang-Undang ini?
 6. Apa tantangan yang dihadapi oleh pemda terkait dengan berpindahnya PBB dan BPHTB sebagai pajak daerah?
 7. Dengan tantangan2 tersebut, bagaimana usaha pemda meningkatkan penerimaan daerah dari PAD khususnya Pajak Daerah?
 8. Sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, NPOPTKP untuk BPHTB adalah 60 juta rupiah. Mengingat kondisi tanah dan bangunan yang terdapat di Kota/Kab dapat diprediksi bahwa penerimaan BPHTB tidak begitu besar. Seberapa besar potensi penerimaan BPHTB dan PBB dapat direalisasikan?

**KUISIONER KE DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA) KOTA PAYAKUMBUH
STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 MENGENAI PAJAK DAERAH
(STUDI KASUS PERBANDINGAN KOTA PAYAKUMBUH DAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA)**

Dalam rangka mendukung studi di atas, peran serta aktif dari Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) untuk mengisi kuesioner ini sangat diharapkan sebagai masukan untuk membantu Peneliti mengetahui Kesiapan Pemerintah Daerah atas Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah (Studi Kasus perbandingan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota).

MOHON KIRANYA KUESIONER INI DAPAT DIISI DENGAN LENGKAP DAN DIKEMBALIKAN KEPADA PENELITI UNTUK MENGETAHUI TINGKAT KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 MENGENAI PAJAK DAERAH

Identitas Pengisi Kuisisioner

jenis Kelamin : _____
jabatan : _____
tingkat Pendidikan : _____
disiplin Ilmu : _____

A. Pengetahuan Umum Mengenai Pajak Daerah

1. Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat disebut
 - a. Iuran daerah
 - b. Pendapatan daerah
 - c. Retribusi daerah
 - d. Pajak daerah

2. Kriteria pajak daerah adalah
 - a. Adanya kontraprestasi langsung
 - b. Merupakan objek pajak provinsi dan/atau pusat
 - c. Manfaat dan beban pajaknya dinikmati dan ditanggung oleh seluruh masyarakat di Indonesia
 - d. Memiliki mobilitas yang cukup rendah serta objek pajak terdapat di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan
3. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah yang terdiri 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Penambahan jenis pajak baru tersebut meliputi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Rokok, dan Pajak Hotel
 - b. Pajak Rokok, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Sarang Burung Walet.
 - c. Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan PBB P2
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak PBB P2, BPHTB dan Pajak Air Tanah
4. Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang adalah
 - a. 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender
 - b. 1 (satu) tahun takwin
 - c. 3 (tiga) bulan kalender
 - d. Akhir tahun pajak
5. Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak disebut

- a. Pencatatan
- b. Pemeriksaan
- c. Pembukuan
- d. Pelaporan

6. Suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dikenal dengan istilah

- a. Penagihan
- b. Pemungutan
- c. Penilaian
- d. Penetapan

7. Pernyataan I

Jenis pajak daerah bersifat limitatif yang berarti daerah tidak dapat memungut pajak selain yang telah ditetapkan.

Pernyataan II

Dalam pelaksanaannya, daerah (provinsi dan kab/kota) dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Jawaban atas kedua pernyataan di atas adalah

- a. Semuanya benar
- b. Kedua pernyataan Salah
- c. Pernyataan I benar dan Pernyataan II salah
- d. Pernyataan I salah dan Pernyataan II benar

8. Tujuan penetapan tarif pajak secara seragam adalah

- a. Menghindari kecurangan pajak
- b. Menghindari pelarian objek pajak ke daerah-daerah yang tarif pajaknya relatif rendah
- c. Menciptakan keseragaman pendapatan atas pajak daerah
- d. Memudahkan perhitungan pajak daerah yang terutang

B. Pemahaman Mengenai Perubahan Undang-Undang Pajak Daerah (UU No. 28 Tahun 2009)

1. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah
 - a. Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 - b. Bumi dan Bangunan yang dimanfaatkan oleh orang pribadi.
 - c. Bumi dan Bangunan yang terdapat di perdesaan dan perkotaan.
 - d. Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
2. Berikut ini termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, **kecuali**
 - a. Digunakan oleh orang pribadi untuk melakukan kegiatan usaha
 - b. Dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan sebagai tempat tinggal
 - c. Digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnis
 - d. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling rendah sebesar
 - a. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - b. Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c. Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - d. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
4. SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya pada
 - a. 15 (lima belas) hari kerja
 - b. 1 (satu) bulan setelah SPOP diterima

- c. 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
 - d. 3 (tiga) bulan kalender
5. Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada
- a. Tanggal 1 Januari
 - b. Tanggal 31 Desember
 - c. Akhir tahun buku
 - d. 3 (tiga) bulan terakhir
6. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah
- a. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)
 - b. NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak)
 - c. NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
 - d. NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
7. Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam perhitungan BPHTB untuk setiap Wajib Pajak ditetapkan paling rendah sebesar
- a. Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 - b. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - c. Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - d. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
8. Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana yang telah ditetapkan Undang-Undang tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah
- a. NJOPTKP
 - b. NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
 - c. NJOPKP
 - d. NPOPTKP
9. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar
- a. 10% dan 5%
 - b. 5% dan 0,1%
 - c. 0,3% dan 5%
 - d. 5% dan 0,3%

C. Pengetahuan Mengenai Pemungutan Pajak Daerah

1. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud berupa
 - a. Formulir SSP (Surat Setoran Pajak)
 - b. Karcis dan nota perhitungan
 - c. Memo
 - d. STP (Surat Tagihan Pajak)
2. Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPDKB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar pada saat
 - a. 3 bulan setelah dilaporkannya pajak terutang
 - b. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak
 - c. Tanggal 31 bulan berikutnya setelah terutang pajak
 - d. Akhir tahun setelah perhitungan pajak terutang
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
 - a. 10% (sepuluh persen) sebulan dihitung sejak keterlambatan pembayaran
 - b. 5% (lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
 - c. 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - d. 0,2% (nol koma dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
4. Alasan diterbitkan SKPKBT adalah
 - a. Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - b. Jika wajib pajak tidak memenuhi sanksi yang telah ditetapkan

- c. Jika jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak
 - d. Jika jumlah kredit pajak besar dari pajak terutang
5. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT dikenakan kenaikan sanksi administratif sebesar
- a. 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut
 - b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak terutang
 - c. 200% (dua ratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
 - d. 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekurangan pajak
6. Pengajuan keberatan dapat dilakukan pada waktu
- a. Paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - b. Tanggal 31 bulan berikutnya setelah pemungutan
 - c. 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemotongan atau pemungutan
 - d. Segera setelah dilakukan pemungutan
-

Lampiran 3

Keputusan Presiden RI No. 31 Desember 2010

Dines/Kotter/Intrusi

: D: P% A

: Bukit Sibuluk Payakumbuh

:92052

Alarm: Number
No. Tally on

[illegible]

jumlah, jenis, lokasi struktural dan jumlah pebisnis

[illegible]

Nama Jabatan (Hanya untuk eselon II - IV)	Tingkat Eselon	Nama Pejabat
1	2	3
Seksi Perhubungan	IV	SYULHEDDY SYARIEF, S.Sos
Seksi Kebijakan Peny. Anggaran	IV	DARULIMBAR, SE
Seksi Peny. Anggaran	IV	
Seksi Pengendalian Pembinaan & Supervisi	IV	ENHANTY, S.Sos
Seksi Penerimaan & Pelaporan	IV	REFSI
Seksi Pengadaan Belanja Tidak Langsung	IV	ELUMURNI, S.Sos
Seksi Pengadaan Belanja Langsung	IV	NITA HERUNA
Seksi Pelaksanaan Akutansi	IV	HAULHA KUSWATI
Seksi Pengadaan Asat	IV	RUSDI
Seksi Pengawasan Keuangan Daerah	IV	ANDI JAYA, B.Sc

Payakumbuh, 2011
KEPALA DESKALISTA PAYAKUMBUH

19530907 198C03 1 C03

Lampiran 4

Jawaban Kuisisioner Responden Kota Payakumbuh

Responden	Q1	Soal	Med	Kategori	Q2	Soal	Med	Kategori	Q3	Soal	Med	Kategori
1	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
2	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
3	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
4	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
5	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
6	6	7	3,5	paham	7	9	4,5	paham	5	6	3	paham
7	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
8	6	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
9	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
10	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
11	3	7	3,5	kurang paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
12	7	7	3,5	paham	7	9	4,5	paham	5	6	3	paham
13	6	7	3,5	paham	7	9	4,5	paham	5	6	3	paham
14	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
15	6	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
16	6	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	6	6	3	paham
17	7	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham
18	6	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	5	6	3	paham

Jawaban Kuisioner Responden Kabupaten Lima Puluh Kota

Responden	Q1	Soal	Med	Kategori	Q2	Soal	Med	Kategori	Q3	Soal	Med	Kategori
1	2	7	3,5	kurang paham	5	9	4,5	paham	3	6	3	paham
2	2	7	3,5	kurang paham	5	9	4,5	paham	3	6	3	paham
3	5	7	3,5	paham	4	9	4,5	kurang paham	4	6	3	paham
4	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
5	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
6	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
7	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
8	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
9	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
10	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
11	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
12	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
13	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
14	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham
15	5	7	3,5	paham	8	9	4,5	paham	3	6	3	paham

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS

Jl. Sri Rejeki No.5 Kel. Bulakan Balai Kandi Telp. (0752) 95713
Kota Payakumbuh

REKOMENDASI

Nomor. B.070/030/KesbangPol/II/2011

**TENTANG
IZIN PENGAMBILAN DATA**

Berdasarkan Surat dari Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Nomor : 08/H-16-5/PP-2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Permohonan Permintaan Data, dengan ini kami Pemerintah Kota Payakumbuh memberi izin pengambilan data kepada :

N a m a	:	RIZA FEBRI
Tempat/Tgl Lahir	:	Kubang/ 04 Februari 1989
Pekerjaan	:	Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
A l a m a t	:	Jl. Padang Pasir 9 Nomor 62 Padang
Kartu Identitas	:	07 153 017 (Kartu Mahasiswa)
Maksud/tujuan	:	Dalam rangka melengkapi data untuk penyusunan skripsi dengan judul "Dampak Undang-undang No. 28 tahun 2009 terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (studi kasus Perbandingan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)"
Lokasi Penelitian	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh
Waktu Penelitian	:	24 Februari s/d 24 Maret 2011
Anggota Penelitian	:	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak boleh menyimpang dari tujuan pengambilan data.
- 2. Memberitahukan / melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas / Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu.
- 3. Mematuhi semua Peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
- 4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kota Payakumbuh.
- 5. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka surat keterangan / Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu.

Payakumbuh, 23 Februari 2011
An. WALIKOTA PAYAKUMBUH
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN LINMAS
Kasubag Tata Usaha



Penyampaian disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kaban Kesbang Pol Linmas di Padang
- Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
- Bapak Kepala Dinas DPPKA Kota Payakumbuh di Payakumbuh
- Sdr. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas di Padang
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Jend.Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp.Fax (0752) 94155 / 94097

REKOMENDASI

No:300/82/BKPPM-LK/II-2011

Tentang
Izin Penelitian

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Unand Padang No:408/H-16-5/PP-2011 tanggal 21 Februari 2011 perihal Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama	: Riza Febri
Tempat/Tanggal Lahir	: Kubang / 04 Februari 1989
Pekerjaan	: Mahasiswa Unand
Alamat	: Jl. Soekarno Hatta 03/01 Keluran Balai Kandi Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
Nomor Induk Kependudukan	: 0000046571/0000021719
Judul Penelitian	: Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terhadap Kemampuan Keuangan Daerah (Studi Kasus Perbandingan Kab. Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh)
Lokasi Penelitian	: DPKD Kab. Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: Februari s/d Maret 2011

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/ melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangannya serta menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota Cq. Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka surat Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan kepada saudara untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 28 Februari 2011
a/n Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kabid. Kewaspadaan dan Pemb.



(JONI AMIR, S.Sos)

NIP. 19650919 199003 1 003

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala DPKD Kab. Lima Puluh Kota di Payakumbuh
3. Sdr. Ketua Jurusan Akuntansi Unand Padang di Padang
4. Peringgal.